

Analisis Efektivitas Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas dalam Mendukung Kinerja Bawaslu Kota Makassar

Warka Syachbrani ✉

Jurusan Ilmu Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian manajemen (SPM) dalam mendukung kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar. Fokus utama penelitian adalah peran SPM dalam proses perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja, serta dampaknya terhadap efisiensi dan akuntabilitas organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategis yang berbasis pada Rencana Strategis (RENSTRA) menjadi landasan kokoh untuk mendukung visi dan misi organisasi. Penyusunan anggaran yang transparan dan berbasis partisipasi memastikan alokasi dana yang efisien dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan, koordinasi antarunit kerja dan kepatuhan pada rencana kerja menjamin efisiensi sumber daya dan pencapaian tujuan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin memungkinkan identifikasi kendala dan perbaikan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan transparan. Secara keseluruhan, implementasi SPM di Bawaslu Kota Makassar telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung kinerja organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Organisasi; Efektivitas Kinerja; Perencanaan Strategis; Sistem Pengendalian Manajemen; Transparansi Anggaran.*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the management control system (MSS) in supporting the performance of the Makassar City Election Supervisory Agency (Bawaslu). The main focus of the study is the role of MSS in the strategic planning process, budget preparation, activity implementation, and performance evaluation, as well as its impact on organizational efficiency and accountability. This study uses a qualitative descriptive approach with interview and documentation methods. The results of the study indicate that strategic planning based on the Strategic Plan (RENSTRA) is a solid foundation for supporting the organization's vision and mission. Transparent and participation-based budgeting ensures efficient and targeted fund allocation. In implementation, coordination between work units and compliance with the work plan ensure resource efficiency and achievement of goals. Routine performance evaluations allow for the identification of constraints and continuous improvement, creating an accountable and transparent work environment. Overall, the implementation of MSS in the Makassar City Bawaslu has made a positive contribution in supporting organizational performance, increasing operational efficiency, and strengthening accountability in public financial management.

Keywords: *Budget Transparency; Management Control System; Organizational Accountability; Performance Effectiveness; Strategic Planning.*

✉ Corresponding author :

Email Address : warka.syachbrani@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga negara yang berperan penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menindaklanjuti berbagai laporan terkait pelanggaran Pemilu. Di tengah perannya yang vital, Bawaslu Kota Makassar menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan akan pengelolaan yang efisien, dan tekanan untuk menjaga independensinya dalam menjalankan tugas. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pengendalian manajemen (SPM) yang efektif menjadi elemen penting dalam memastikan kelancaran operasional organisasi (Anthony & Govindarajan, 2017).

Sistem pengendalian manajemen merupakan mekanisme yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terarah (Brownell, 1982). SPM berperan untuk menciptakan prosedur kerja yang sistematis, meningkatkan efisiensi, serta memastikan semua keputusan organisasi sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Di Bawaslu Kota Makassar, penerapan SPM bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas publik, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran.

Perencanaan strategis menjadi salah satu elemen kunci dalam SPM, karena menentukan arah dan prioritas organisasi (Afifuddin & Mulyadi, 2016; Anthony & Govindarajan, 2017; Hofstede, 1984). Bawaslu Kota Makassar mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman utama dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan indikator kinerja. Dokumen ini tidak hanya menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis tetapi juga alat untuk mengukur pencapaian organisasi. Kolaborasi erat antara Bawaslu pusat dan daerah memastikan bahwa proses perencanaan strategis mencerminkan kebutuhan lokal sekaligus sejalan dengan kebijakan nasional.

Selain perencanaan strategis, penyusunan anggaran menjadi aspek penting dalam SPM (Melati et al., 2022). Anggaran di Bawaslu Kota Makassar disusun secara transparan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) serta Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dengan proses penyusunan yang berbasis partisipasi, Bawaslu memastikan alokasi dana yang sesuai dengan prioritas organisasi.

Pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi penggunaan sumber daya tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.

Pelaksanaan kegiatan di Bawaslu Kota Makassar juga menjadi bagian integral dari SPM. Pelaksanaan yang terstruktur berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional. Setiap unit kerja berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sinergi antara berbagai unit kerja memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit, tanpa mengesampingkan visi dan misi lembaga secara keseluruhan (Afifuddin & Mulyadi, 2016; Fitriah, 2021; Mardiasmo, 2011).

Evaluasi kinerja melengkapi siklus SPM di Bawaslu Kota Makassar. Proses evaluasi dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini tidak hanya membantu organisasi untuk menentukan langkah perbaikan tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang (Hofstede, 1984; Hopwood, 1972). Dengan pendekatan evaluasi yang partisipatif, Bawaslu Kota Makassar menciptakan budaya kerja yang terbuka dan responsif terhadap perubahan.

Dalam perspektif efektivitas manajemen keuangan, penerapan SPM di Bawaslu Kota Makassar telah berkontribusi pada efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Transparansi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, mencerminkan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas publik. Hal ini sangat relevan mengingat peran Bawaslu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi tidak dapat diabaikan. Akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil (Kaplan & Norton, 2004; Mardiasmo, 2011; Merchant & der Stede, 2017; Zimmerman, 2010). Dalam konteks Bawaslu Kota Makassar, akuntabilitas menjadi indikator keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik, khususnya dalam pengawasan Pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di Bawaslu Kota Makassar dapat mendukung efektivitas kinerja organisasi, khususnya dari sudut pandang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya penerapan SPM yang baik untuk meningkatkan kualitas tata kelola lembaga publik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana sistem pengendalian manajemen

(SPM) diterapkan di Bawaslu Kota Makassar serta dampaknya terhadap efektivitas kinerja organisasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses, pola, dan praktik SPM secara mendalam, terutama dalam konteks perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian adalah kantor Bawaslu Kota Makassar. Objek penelitian mencakup sistem pengendalian manajemen yang diterapkan, meliputi dokumen strategis, laporan anggaran, prosedur operasional, dan hasil evaluasi kinerja organisasi. Data dikumpulkan melalui dua metode utama:

- **Wawancara:** Dilakukan dengan staf dan pimpinan Bawaslu Kota Makassar, termasuk kepala bagian administrasi, bagian keuangan, dan pengawasan. Wawancara ini bertujuan menggali informasi mendalam terkait penerapan SPM dalam mendukung operasional organisasi.
- **Dokumentasi:** Melibatkan pengumpulan dokumen resmi seperti Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA), Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta laporan evaluasi kinerja.

Teknik Analisis Data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang terdiri dari tahapan berikut:

- **Pengumpulan Data:** Semua informasi yang relevan dikumpulkan dari wawancara dan dokumen.
- **Reduksi Data:** Data yang tidak relevan atau berulang dieliminasi untuk fokus pada informasi penting.
- **Penyajian Data:** Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
- **Penarikan Kesimpulan:** Dilakukan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul untuk menjawab tujuan penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas SPM di Bawaslu Kota Makassar serta kontribusinya terhadap manajemen keuangan dan akuntabilitas organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait penerapan sistem pengendalian manajemen (SPM) di Bawaslu Kota Makassar, khususnya dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi dari perspektif manajemen keuangan dan akuntabilitas. Berikut hasilnya:

1. Perencanaan Strategis

- Perencanaan strategis di Bawaslu Kota Makassar berbasis pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan indikator kinerja yang jelas.

- Kolaborasi antara pusat dan daerah dalam penyusunan RENSTRA memungkinkan rencana strategis mencerminkan kebutuhan lokal dan tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
- Indikator kinerja yang disusun berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan program dan mempermudah proses evaluasi.

2. Penyusunan Anggaran

- Penyusunan anggaran mengikuti pedoman dari pusat, terutama berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) serta Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Proses penyusunan dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan masukan dari berbagai unit kerja.
- Anggaran disusun untuk memastikan efisiensi dan efektivitas alokasi dana, dengan fokus pada program prioritas.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang mengatur setiap program dan alokasi anggaran secara terstruktur.
- Pengawasan internal dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
- Koordinasi antarunit kerja menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Evaluasi Kinerja

- Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin, melalui rapat mingguan yang melibatkan seluruh unit kerja.
- Evaluasi menilai keberhasilan program berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan.
- Pendekatan evaluasi bersifat partisipatif, dengan ruang bagi staf untuk memberikan masukan dan solusi.

Pembahasan

1. Perencanaan Strategis: Pilar Efektivitas

Perencanaan strategis di Bawaslu Kota Makassar tidak hanya mendukung arah operasional tetapi juga memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah menciptakan dokumen RENSTRA yang relevan dan kontekstual. Proses ini mencerminkan prinsip *good governance*, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi. Perencanaan strategis yang solid memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai tujuan, sekaligus memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya (Brownell, 1982; Mardiasmo, 2011).

2. Penyusunan Anggaran: Transparansi dan Efisiensi

Proses penyusunan anggaran di Bawaslu Kota Makassar menunjukkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas publik. Dengan keterlibatan unit kerja dalam proses ini, penyusunan anggaran tidak hanya memenuhi prinsip efisiensi tetapi juga

meningkatkan rasa tanggung jawab di antara staf. Transparansi dalam pengelolaan anggaran meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi, yang penting bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu (Melati et al., 2022).

3. Pelaksanaan Kegiatan: Implementasi yang Terstruktur

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKA memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Sinergi antarunit kerja menjadi kekuatan utama dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks efektivitas manajemen keuangan, pelaksanaan yang disiplin memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai tujuan, mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan (Simons, 1995).

4. Evaluasi Kinerja: Alat Penguatan Akuntabilitas

Evaluasi rutin tidak hanya membantu mengidentifikasi keberhasilan program tetapi juga menjadi sarana untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh staf dalam proses evaluasi, Bawaslu Kota Makassar menciptakan budaya kerja yang terbuka dan responsif. Hal ini mendukung prinsip akuntabilitas internal dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut (Brownell, 1982).

Implikasi terhadap Efektivitas Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting terkait penerapan sistem pengendalian manajemen (SPM) di Bawaslu Kota Makassar, khususnya dalam mendukung efektivitas manajemen keuangan dan akuntabilitas. Implikasi ini mencakup dampak langsung terhadap pengelolaan organisasi serta kontribusinya pada aspek yang lebih luas.

1. Penguatan Efektivitas Manajemen Keuangan

Penerapan SPM yang terstruktur di Bawaslu Kota Makassar menunjukkan bahwa organisasi publik dapat mengelola sumber daya keuangannya secara efisien dengan mengadopsi prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi. Penyusunan anggaran yang berbasis pada kebutuhan riil dan prioritas strategis memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara tepat sasaran. Hal ini penting untuk menghindari pemborosan sumber daya sekaligus memastikan program-program prioritas dapat terlaksana dengan optimal. Efisiensi yang dihasilkan memberikan model pengelolaan keuangan yang dapat diadaptasi oleh lembaga publik lain dengan tanggung jawab serupa.

2. Penguatan Akuntabilitas Publik

Transparansi dalam penyusunan anggaran dan pelaporan kinerja, serta keterlibatan berbagai unit kerja dalam evaluasi, mencerminkan akuntabilitas organisasi yang tinggi. Akuntabilitas ini tidak hanya memperkuat kepercayaan internal staf terhadap pimpinan organisasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi lembaga publik,

pendekatan yang diterapkan di Bawaslu Kota Makassar dapat menjadi contoh keberhasilan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga negara.

3. Model Perbaikan Berkelanjutan

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala memberikan peluang bagi Bawaslu untuk terus melakukan penyesuaian dalam sistem pengendalian manajemen yang diterapkan. Proses ini menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan, di mana setiap kekurangan yang ditemukan dapat segera diatasi, sementara praktik baik dapat terus dikembangkan. Hal ini menciptakan fleksibilitas organisasi yang memungkinkan Bawaslu Kota Makassar untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat secara efektif.

Selanjutnya, penerapan SPM di Bawaslu Kota Makassar tidak hanya mendukung pencapaian tujuan strategis tetapi juga memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan akuntabel. Implikasi ini menunjukkan bahwa SPM yang baik merupakan kunci keberhasilan bagi organisasi publik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pengendalian manajemen (SPM) yang diterapkan di Bawaslu Kota Makassar telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi, khususnya dari perspektif manajemen keuangan dan akuntabilitas. Temuan menunjukkan bahwa SPM berperan penting dalam empat aspek utama: perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja.

Perencanaan strategis yang berbasis pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) memungkinkan organisasi untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan dengan indikator kinerja yang terukur. Kolaborasi antara Bawaslu pusat dan daerah menciptakan rencana yang relevan dan efektif, memberikan dasar yang kuat untuk operasional organisasi. Penyusunan anggaran yang transparan dan berbasis partisipasi memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam alokasi sumber daya, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik.

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) menunjukkan disiplin dalam implementasi program, dengan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan efisiensi sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin memberikan landasan untuk perbaikan berkelanjutan, menciptakan siklus yang memastikan fleksibilitas organisasi dalam merespons perubahan dan tantangan.

Secara keseluruhan, penerapan SPM di Bawaslu Kota Makassar mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan tetapi juga memperkuat akuntabilitas organisasi, baik secara internal maupun di mata masyarakat. Dengan demikian, SPM yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam mendukung fungsi pengawasan Bawaslu Kota Makassar dan menciptakan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

Referensi :

- Afifuddin, & Mulyadi. (2016). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2017). *Management Control Systems* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Brownell, P. (1982). The Role of Accounting Data in Performance Evaluation, Budgetary Participation, and Organizational Effectiveness. *Journal of Accounting Research*, 20, 12–27.
- Fitriah, N. K. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Takalar Menggunakan Konsep Value For Money*.
- Hofstede, G. (1984). Cultural Dimensions in Management and Planning. *Asia Pacific Journal of Management*, 1(2), 81–99.
- Hopwood, A. G. (1972). An Empirical Study of the Role of Accounting Data in Performance Evaluation. *Journal of Accounting Research*, 10, 156–182.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Harvard Business School Press.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Melati, M., Rahayu, S., & Choiriyah, C. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Pemerintahan Kota Palembang. *Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & SDM*, 3(1), 26–38.
- Merchant, K. A., & der Stede, W. A. (2017). *Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives* (4th ed.). Pearson.
- Simons, R. (1995). *Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal*. Harvard Business School Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zimmerman, J. L. (2010). *Accounting for Decision Making and Control* (7th ed.). McGraw-Hill Education.